

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Emi Rachmawati, Rannie D K Rachaju, Dina Alamianti
Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No.116, 40261, Bandung, Indonesia, Telp.022-
4230601, email: e.rachmawati26@gmail.com; r.rachaju@gmail.com; nadien5@gmail.com

ABSTRAK

Objek daya tarik wisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan pariwisata yang ada di Indonesia, salahsatunya adalah kampung adat Cireundeu di Kecamatan Cimahi Jawa Barat yang memiliki potensi wisata yang masih dikembangkan hingga saat ini. Potensi wisata tidak lepas dari peran pemerintah setempat yang dalam pengembangan pembangunan desa wisata dapat dilakukan melalui regulasi dan perijinan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang membuat pelaksanaan kebijakan pembangunan desa wisata kampung adat Cireundeu belum optimal. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi kebijakan publik tentang pengembangan desa wisata di kampung adat Cireundeu yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) sebagai unsur pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pembangunan desa wisata yang dilakukan oleh Disbudparpora melalui pendekatan komunikasi persuasif dan juga terdapat faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Disbudparpora juga berupaya untuk melakukan pembinaan dan pelibatan secara aktif kepada masyarakat adat guna pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: komunikasi, kebijakan publik, desa wisata.

COMMUNICATION OF PUBLIC POLICY IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGE IN KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

ABSTRACT

The objects of tourism attraction have an important role in Indonesia's tourism growth, as an example is Cireundeu adat village in Cimahi, West Java. Which has potentials to be a tourism destination, and still being developed of late. The potentials to be a tourism destination cannot be separated from local government involvement to the development of village tourism, which can be done through regulation and authorization, but in the enactment process, there are several factors that make policy implementation of Cireundeu adat village development as tourism destination is not optimal. The purpose of this research is to know the implementation on communication of public policy, particularly about the development of tourism village in Cireundeu Adat Village that led by the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports (Disbudparpora) as an Executive element. This research uses qualitative research methods with data collection procedures are through observation, in-depth interviews, and related documentation. This research concludes that the communication on public policy of village tourism development led by Disbudparpora was through persuasive communication approach, along with that, there are constrain factors and supporting factors in the implementation. Disbudparpora also must actively provide guidance in development process and more engaging with the indigenous peoples for sustainable tourism development.

Keywords: communication, public policy, tourism village.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki daerah wisata yang beragam dan memiliki kekhasannya masing-masing serta dapat menjadi potensi yang tumbuh dari kearifan lokal seiring dengan pembangunan yang berkembang. Salahsatunya adalah dengan keberadaan kampung adat sebagai kearifan lokal yang perlu untuk dilestarikan oleh masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Objek daya tarik wisata kampung adat sebagai desa wisata bila dikelola dengan baik maka dapat menarik minat wisatawan untuk berwisata ke daerah tersebut. Diperlukan pengelolaan pembangunan desa wisata yang memiliki kekhasan dan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam memadukan konten kearifan lokal dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak secara masif dan progresif.

Kawasan kampung adat Cireundeu terletak di kecamatan Cimahi Selatan provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik kearifan lokal yang menarik terutama pada aspek akselerasi pembangunan. Kampung adat Cireundeu memiliki budaya dari masyarakat adatnya yang berprinsip pada "*Ngidung ka waktu, Mibapa ka zaman*", maksud dari pernyataan tersebut adalah masyarakat adat Cireundeu memiliki ciri

khas dan keyakinan masing-masing dan tidak melawan perkembangan zaman yang ada. Masyarakat adat ini membuka diri tapi tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai warga adat. Sebagian besar warga Cireundeu masih memegang teguh ajaran Agama Jawa Sunda yang dikenal dengan Sunda Wiwitan. Selain itu, keberadaan lokasi kampung adat Cireundeu didukung dengan pemandangan alam sebagai salahsatu daya tarik wisata seperti Batu Cadas Gantung, Hutan Lindung Kampung Cireundeu, dan Hutan Tutupan. Kampung adat Cireundeu juga memiliki tradisi kuliner yang dikenal sebagai kampung singkong karena makanan pokok masyarakat adat Cireundeu adalah rasi yaitu beras yang terbuat dari singkong. Kampung Adat Cireundeu ditetapkan menjadi Desa Wisata sejak tahun 2015.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pengembangan pembangunan desa wisata. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan perangkat-perangkatnya yaitu berupa regulasi dan perijinan sangat diperlukan, sehingga secara hirarkis administratif desa wisata dapat dibina dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan pada regulasi tentang tujuan utama program pembangunan Desa wisata terkait dengan keberadaan kampung adat Cireundeu

sebagai satu diantaranya desa wisata yang terletak di kota Cimahi, diantaranya adalah adanya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa potensi kepariwisataan di Kota Cimahi, perlu dikembangkan untuk menunjang pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan pada Khususnya.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kota Cimahi, perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Cimahi sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan.

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi, menyebutkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia pariwisata di daerah, meliputi kerjasama dengan institusi pemerintah pusat/daerah lainnya/internasional ataupun institusi swasta untuk mengembangkan pelatihan baik teknis maupun manajerial untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pariwisata di daerah, mengembangkan kapasitas dan kemampuan seluruh personil yang terkait

dan bekerja di sektor pariwisata daerah, serta melakukan kerjasama atau membuat pusat pelatihan pariwisata berbasis kreatif.

Selanjutnya pada Pasal 22 Perda Kota Cimahi No.1 Tahun 2015 pada point (e) menjelaskan bahwa kawasan pariwisata yang memiliki daya saing tinggi dengan bertumpu pada peningkatan nilai pariwisata, diantaranya memiliki keunikan dan kekhasan, bentang alam dan budaya, kapasitas sumberdaya dan daya dukung, ketersediaan fasilitas umum, ketersediaan fasilitas pariwisata, akses Domestik dan Internasional, akses dan jaringan transportasi di sekitar Kawasan Pariwisata, informasi dan investasi, kesiapan masyarakat, sikap, opini dan partisipasi, kelembagaan dan kerjasama di masyarakat, minat/aktivitas dan tingkat kepuasan di kawasan pariwisata, dan sebagainya. Salahsatu komponen aparatur pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan regulasi tentang pariwisata dan pengembangannya diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata,

kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah daerah Cimahi yang disertai dengan peraturan daerah dalam pengembangan desa wisata sebagai kawasan pariwisata yang memiliki daya saing tinggi maka diperlukan upaya dalam pelaksanaannya yaitu satu diantaranya memerlukan koordinasi dengan berkomunikasi dari tingkat daerah hingga kepada masyarakat setempat dan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Untuk menjelaskan tentang aktivitas maupun program terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat kepada masyarakat lokal dalam hal ini adalah warga kampung adat Cireunde, maka diperlukan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan unsur-unsur dalam komunikasi yang dikemukakan oleh Lasswell yaitu Pengirim pesan / komunikator, pesan (message), media (channel), penerima pesan/ komunikan serta efek/ umpan balik. Komunikasi dapat dijelaskan dengan unsur "*who, says what, in which channel, to whom, and with what effect*". (Effendy, 2005:10).

Mengacu pada latar belakang masalah, peneliti ingin mengetahui lebih jauh seperti apa dan bagaimana pemerintah setempat memperhatikan perkembangan yang terjadi pada Wisata Desa Adat Cireunde, fokus dari penelitian ini adalah Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Desa Adat Cireunde (Studi Di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi), dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Mengetahui Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireunde oleh Disbudparpora Kota Cimahi; 2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireunde Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap apa yang terjadi di dalam kenyataan empirik dan penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus yakni studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi Kasus menurut

Robert K Yin memiliki pengertian terkait dengan penelitian yang rinci mengenai seseorang atau unit sosial dengan kurun waktu yang tertentu. (2008:18)

Pada penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrumen penelitian dapat lebih mengungkap makna mengenai objek yang diteliti dibalik interaksi sosial antara peneliti dengan informan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya tetapi teori dijadikan sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian.

Secara rinci pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan observasi partisipan seperti yang dikemukakan Sugiyono (2010:66) bahwa : *“Moderate participation mean that researcher maintain a balance between being insider and being outsider”*. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan melakukan tanya jawab lisan diantara dua orang atau lebih secara langsung dengan pendekatan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tidak terstruktur

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian atau informan secara terbuka melalui wawancara di Kampung Wisata Desa Adat Cireundeu, diantaranya dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi, Ais Pangampih Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi yaitu seorang yang memberikan informasi terkait bahasa, simbol-simbol mengenai adat, dan Ais Panitren Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi yaitu seorang yang ditugaskan sebagai hubungan masyarakat (*spokeperson*) dari masyarakat adat Cireundeu.

Teknik pengumpulan data selain dengan observasi dan wawancara juga dengan dokumentasi yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:95). yakni analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

melalui kegiatan antara lain: 1) Memproses satuan, pengolahan data dimulai dengan yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian membuat rangkuman dari catatan lapangan; 2) Kategori, menentukan atas dasar pikiran, institusi, pendapat atau kriteria terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing (penyajian data); 3) Menarik kesimpulan dan verifikasi, merupakan bagian dari suatu konfigurasi kegiatan yang utuh. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu oleh Disbudparpora Kota Cimahi

Seperti halnya dengan model Lasswell, studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pernyataan : *what, why, who, where, and how*. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang merupakan aspek penting dalam menelaah proses kebijakan. Implementasi kebijakan bisa diartikan sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat tertentu. Abdullah menyatakan bahwa terdapat tiga

unsur yang penting dalam proses implementasi yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, target groups merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, Unsur pelaksanaan (Implementer), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Abdullah, 1998:11).

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi dari kebijakan publik dan penerapannya. Pemerintah setempat yaitu Disbudparpora kota Cimahi bertindak sebagai komunikator dalam menerapkan kebijakan publik terkait dengan pengembangan desa wisata di kampung adat Cireundeu. Disbudparpora sebagai pelaksana (komunikator) memiliki kapasitas organisasional maupun administratif yang terefleksikan dalam fungsi struktur, personil dan kelayakan finansial merupakan syarat yang harus dimiliki untuk menunjang terlaksananya program dari suatu kebijakan. Dibutuhkan sumberdaya manusia (pegawai) yang kompeten, memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Disbudparpora sebagai pelaksana/ komunikator kebijakan Pembangunan Desa

Wisata Adat Kampung Cirendeudeu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang optimal bila ditunjang dengan ketersediaan prasarana pendukung untuk penyampaian komunikasi kebijakan pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cirendeudeu yang dalam hal ini belum optimal. Pengembangan desa wisata dapat juga dilakukan dengan pembinaan kepada kelompok penggerak pariwisata dan pembinaan pengelolaan Home Stay secara managerial. Disbudparpora memahami bahwa tanah adalah milik komunitas adat dan milik pribadi masyarakat. Rencana Disbudparpora akan melakukan pembenahan pada akses jalan menuju lokasi kampung adat Cirendeudeu di tahun 2020. Disbudparpora mendukung untuk pelaksanaan program seperti penampilan atraksi kesenian, pengelolaan home stay, dan kegiatan duta wisata kesenian.

Metode komunikasi yang digunakan oleh Disbudparpora kota Cimahi untuk menunjang kebijakan pembangunan desa wisata kampung adat Cirendeudeu adalah dengan pendekatan persuasif, dengan melihat karakter masyarakat adat yang sensitive dan eksklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Cimahi diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Metode yang digunakan oleh kami di Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cimahi untuk menunjang Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cirendeudeu Pendekatannya itu persuasif, sangat persuasif karena kita melihat karakter masyarakat adat itu sensitif dan eksklusif . Salah satu metode yang sudah kami coba dengan merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan bekerja secara koperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka. Pendekatan ini mendidik warga masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kegiatan aktif dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan memberdayakan potensi yang telah dimiliki”

Metode lain yang diterapkan oleh Disbudparpora adalah melalui konsep keswadayaan, yang mengandung prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan asumsi bahwa pada dasarnya masyarakat dapat membangun serta memberdayakan dirinya sendiri. Hal ini sangat bermanfaat untuk menjaga identitas setiap satuan kehidupan masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tidak menghasikan disintegrasi atau menjadikan kondisi dan tatanan yang terbentuk menjadi asing bagi masyarakat

sendiri. Pemerintah kota Cimahi berencana untuk menggunakan program Dewi Tapa atau Desa Wisata Ketahanan Pangan namun program ini terhenti tanpa kejelasan sehingga pariwisata di kampung Cireundeu tidak ada kemajuan secara signifikan.

Disbudparpora melakukan kolaborasi dan inovasi agar kampung adat menjadi tujuan wisata dan tidak hanya sekedar dilihat dari pengolahan pangannya, tetapi terdapat atraksi dan kesenian budaya di kampung adat Cireundeu. Disbudparpora memiliki langkah-langkah dalam melaksanakan kebijakan yaitu dengan melakukan pembinaan secara formal melalui rapat dan diskusi, melaksanakan kegiatan secara persuasif, dan mengoptimalkan pendekatan dengan masyarakat adat. Aparat pelaksana yaitu Disbudparpora konsisten dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa wisata kampung adat Cireundeu dengan pembinaan dan menjadikan kampung adat Cireundeu menjadi Top Three wisata di kota Cimahi.

Aktivitas-aktivitas dari kebijakan pembangunan desa wisata, Disbudparpora mensosialisasikan Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah kota Cimahi kepada Dinas lainnya dan menjadikan kampung adat Cireundeu sebagai bagian

dari wisat unggulan kota Cimahi. Selain sosialisasi, terdapat pembagian tugas aparat pemerintah secara struktural serta adanya kelompok swadaya masyarakat adat untuk pengembangan pariwisata dan pengelolaan paket wisata kampung adat Cireundeu. Pada ketercapaian keberhasilan kebijakan pembangunan desa wisata, regulasi dibuat agar Cireundeu menjadi wisata unggulan dan kawasan strategis wisata baik di tingkat Regional maupun Nasional untuk legalitasnya serta mempromosikan kampung adat sebagai pariwisata yang dilatarbelakangi oleh alam tidak hanya sekedar keunikan kampung adatnya.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Disini kita akan selalu berkolaborasi, berinovasi, untuk menjadikan Kampung Adat Cireundeu itu menjadi tujuan wisata bukan hanya dilihat dari pengolahan pangannya yang notabene bahwa sebagian penduduknya memakan makanan pokok sehari harinya berbahan dasarnya singkong juga kita mencoba membuat paket – paket wisata yang bersifat atraksi di kampung Cireundeu, dengan harapan kunjungan wisata ke Cireundeu itu semakin kesini makin banyak”

Kampung adat Cireundeu telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh

Pemerintah daerah melalui beberapa peraturan daerah kota Cimahi bahkan menjadi *top three* wisata unggulan di kota Cimahi. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memberikan keterangan sebagai berikut:

“ kita selalu konsisten dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu dengan menjadikan Cireundeu “*Top Three*” wisata di Kota Cimahi . Kita senantiasa mempromosikan Cireundeu bukan hanya sebagai Masyarakat Adat tetapi sebagai wisata yang ada di Kota Cimahi”.

Kampung adat Cireundeu memiliki luas 64 ha untuk lahan pertanian dan 4 ha untuk pemukiman. Terletak di Kelurahan Leuwigajah kecamatan Cimahi Selatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bertani ketela. Cireundeu berasal dari nama pohon Reundeu, pohon tersebut adalah pohon untuk bahan obat herbal. Mayoritas masyarakat di kampung adat Cireundeu memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini, selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan dan melestarikan budaya serta adat istiadatnya. Masyarakat ini memiliki konsep kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu, yaitu suatu daerah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Leuweung Larangan (hutan

terlarang), Leuweung Tutupan (hutan reboisasi), Leuweung Baladahan (hutan pertanian). Masyarakat adat Cireundeu memiliki sistem kekerabatan dan kepercayaannya sendiri yang menjadi kekhasan dari kampung adat tersebut serta masih ada beberapa jenis upacara yang diselenggarakan oleh kampung adat Cireundeu yaitu Upacara 1 Sura merupakan upacara hari besar untuk pemeluk aliran kepercayaan yang dirayakan mulai dari pagi hingga malam hari bertempat di Bale Saresehan (tempat berkumpul masyarakat adat).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu

Faktor pendukung pelaksanaan komunikasi kebijakan pembangunan desa wisata kampung adat Cireundeu dapat dilihat dari unsur komunikator, komunikan, dan pesan sebagai daya tarik antara lain :

1. Pelaksana kebijakan yaitu pemerintah setempat memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya dengan tenaga yang ahli dan terampil.
2. Masyarakat adat yaitu sebagai komunikan, adalah masyarakat adat yang masih mempertahankan dan menjunjung tinggi adat/budayanya

namun terbuka pada perubahan zaman.

3. Lokasi kampung adat Cireundeu berdekatan dengan kota Bandung, akses ke lokasi masih terjangkau.
4. Pesan yang disampaikan terkait dengan kebijakan publik pengembangan desa wisata yang dapat dijadikan potensi promosi wisata dengan inti pengembangan untuk daerah sekitarnya (konsep wisata system plasma).

Faktor penghambat pelaksanaan komunikasi kebijakan pembangunan desa wisata kampung adat Cireundeu diantaranya :

1. Pemerintah belum secara serius dan berkelanjutan mengembangkan wisata berbasis pengembangan masyarakat.
2. Karakteristik umum masyarakat adat jadi belum ada keterbukaan atau disebut dengan eksklusif,
3. Lokasi Kampung Adat Cireundeu itu berdekatan dengan lokasi tempat pembuangan sampah yang longsor pada beberapa tahun yang lalu, sehingga menghambat akses
4. Belum ada penanganan secara serius, terutama kegiatan desa wisata (lembaga swadaya masyarakat sebagai motor penggerak)

5. Sumber Daya Manusia yang masih perlu di optimalkan
6. Kegiatan networking / pengembangan jaringan kerja belum dibentuk secara optimal.
7. Pembangunan desa wisata di tengah permukiman penduduk, dapat menyebabkan timbulnya perubahan perilaku ke arah negatif di tengah masyarakat.

Disbudparpora kota Cimahi dalam pengembangan desa wisata melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah :

1. Senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat baik warga di lokasi Kampung Adat Cireundeu maupun di luar Kampung Adat Cireundeu.
2. Selalu melibatkan memprioritaskan pelibatan Masyarakat Kampung Adat Cireundeu untuk tidak bersifat eksklusif.
3. Senantiasa memikirkan untuk pembangunan baik secara fisik maupun secara SDM terhadap masyarakat Cireundeu, jadi bukan hanya mengenalkan tetapi juga selalu berpikir bagaimana caranya tetap membangun tetapi masih ada beberapa regulasi yang sampai saat ini belum mendukung hal tersebut.

4. Koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait untuk turut serta mempromosikan Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu.

SIMPULAN

Simpulan dari komunikasi kebijakan pengembangan desa wisata kampung adat Cireundeu oleh Disbudparpora adalah dengan metode pendekatan persuasif, melihat karakter masyarakat adat yang sensitive dan eksklusif. Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat adat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah dan menjadi lebih peduli dan dapat memberdayakan potensi desa yang dimiliki. Metode lain yang diterapkan oleh Disbudparpora adalah melalui konsep keswadayaan, yang mengandung prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan komunikasi kebijakan pengembangan desa wisata kampung adat Cireundeu diantaranya dapat dilihat dari unsur komunikator yaitu Disbudparpora sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas, komunikasi yakni masyarakat adat yang memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan upaya dalam melaksanakan komunikasi kebijakan publik pengembangan desa

wisata. Upaya tersebut antara lain Disbudparpora senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat adat dan melibatkan dalam aktivitas atau penyelenggaraan program yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya dalam aktivitas program promosi desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. M. 1998. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Abidin, Yusuf Zainal. 2016. *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurdin, Ali.dkk. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 1 Tahun 2015,
Tentang Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataaan Daerah
Kota Cimahi.

Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 1 Tahun 2015,
Bab IV Pasal 22 Tentang
Prinsip dan Pendekatan
Pembangunan Kawasan
Pariwisata Kreatif.